



PENGUATAN PERAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH

Delly Maulana*

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.

* Corresponding Author: dellymaulana@unsera.ac.id

ABSTRACT

This research aims to illustrate the importance of the Functional Position of Policy Analyst (JFAK) to improve the quality of public policy, both in the central and local governments. Because, in fact, public policy must prioritize real evidence, which is in accordance with the needs of the community and is the result of the best recommendations through a rational analysis process. The method used is a descriptive qualitative method using Atlas Ti software. The results of the study show how important the role of JFAK is to improve policy quality. However, its role must be strengthened, both through policy and from its authority. Therefore, there are several recommendations that must be made, namely: First, strengthening the role of JFAK through policy and authority; Second, increasing the competence of JFAK so that it has maximum competence in conducting policy analysis; and Third, forming forums so that JFAK gets maximum space to take part in carrying out its duties and functions as a policy analyst.

Keywords: Public Policy; Functional Position; Policy Analyst; Real Evidence Policy; Local Government.

ABSTRAK

Dalam tulisan ini mencoba untuk menggambarkan pentingnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, sejatinya kebijakan publik harus mengedepankan bukti nyata, yakni sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan merupakan hasil rekomendasi terbaik melalui proses analisis yang rasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif dengan menggunakan software Atlas Ti. Dari hasil kajian menunjukkan betapa pentingnya peran JFAK untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Namun perannya harus diperkuat, baik melalui kebijakan maupun dari kewenangannya. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan, yakni: *Pertama*, memperkuat peran JFAK melalui kebijakan dan kewenangan; *Kedua*, peningkatan kompetensi JFAK agar semakin memiliki kompetensi yang maksimal dalam melakukan analisis kebijakan; dan *Ketiga*, membentuk forum-forum agar JFAK semakin mendapatkan ruang yang maksimal untuk berkiprah dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai analis kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Jabatan Fungsional; Analis Kebijakan; Kebijakan Bukti Nyata; Pemerintah Daerah.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v1.i2.10585>

1. PENDAHULUAN

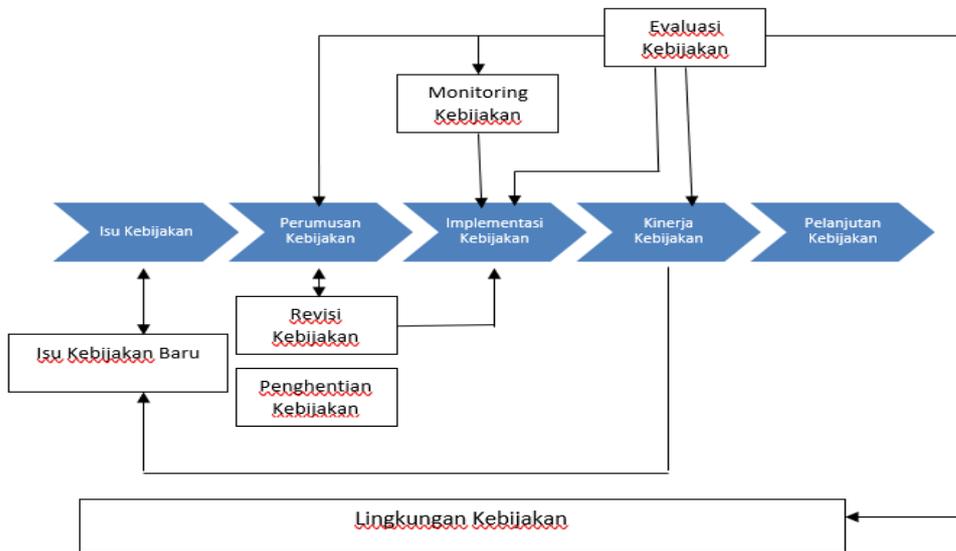
Mengurangi angka kemiskinan dan angka kelaparan pada masyarakat, penanggulangan pengangguran, memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengurangi pencemaran limbah non industri dan industri, mengurangi angka kriminalitas, mengurangi kemacetan, memperbaiki mekanisme transportasi masal, membangun infrastruktur jalan, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, mendorong persamaan gender dan keadilan, menaikkan dan menurunkan harga BBM, dan lain-lain yang berkaitan dengan mengatasi persoalan publik. Gambaran tersebut merupakan isu-isu terkait dengan kebijakan publik.

Secara konseptual kebijakan publik menurut Wilson adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan menurut Ealau dan Kennet Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya.(Maulana and Nugroho 2019)

Selanjutnya, kebijakan publik adalah suatu proses. Proses kebijakan publik diawali oleh pencarian isu kebijakan, setelah itu isu kebijakan dijadikan perumusan kebijakan dengan memilih salah satu alternatif kebijakan publik, setelah itu kebijakan diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dievaluasi kinerjanya, hasil dari evaluasi menjadi satu faktor penentu apakah kebijakan tersebut direvisi untuk dijadikan kebijakan kembali atau dihentikan. Dihentikan karena tidak ada perubahan yang signifikan dari sasaran kebijakan yang sudah direncanakan. Evaluasi kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, baik lingkungan sosial, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.(Nugroho 2016)

Gambar 1

Proses Kebijakan secara Umum



Sumber: Riant Nugroho, *Public Policy*, 2016 :187

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan publik dapat memberikan dampak yang diinginkan oleh masyarakat dan stakeholders lain? Tentu pertanyaan ini harus dijawab bahwa kebijakan publik harus melalui proses analisis sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terbaik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan dalam teknik analisis data dengan menggunakan software atlas TI untuk mendapatkan model peran jabatan analisis kebijakan dalam peningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Kebijakan Publik melalui Proses Analisis

Menurut Quede analisis kebijakan publik merupakan fakta akibat ketidakpusan terhadap proses pembuatan keputusan kebijakan yang digunakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dimanapun. Keluhan akan ketidaefektifan suatu program dan menyia-nyiakan anggaran secara terus menerus oleh pemerintah merupakan persoalan yang mendorong untuk dilakukan analisis dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memperbaiki pembuatan keputusan kebijakan. (Maulana 2023)

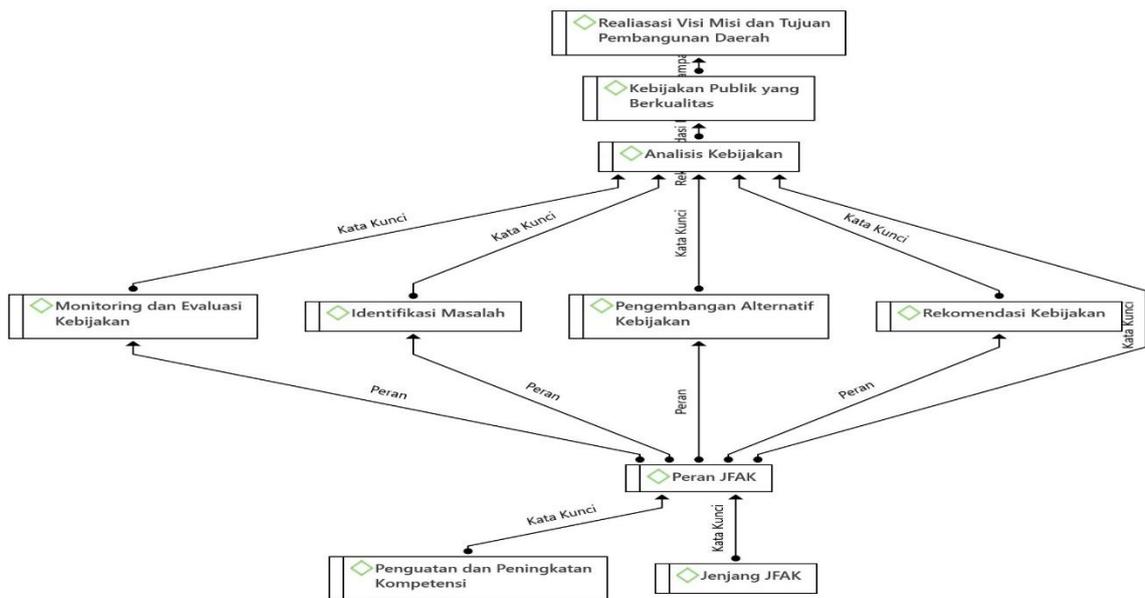
Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan public maka harus mengedepankan beberapa kriteria dalam memilih alternaif kebijakan yang terbaik dalam menyelesaikan persolan-persolan publik. Patton dan Sawicki mengemukakan bahwa ada beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yakni: *Pertama*, harus layak secara teknis (*Technical Feasibility*). Harus menciptakan efektivitas atau mampu menyelesaikan masalah; *Kedua*, mengedepankan kelangsungan politik (*Political Viability*). Apakah suatu kebijakan tersebut dapat diterima oleh aktor-aktor politik, para klien dan aktor-aktor lainnya. Apakah sudah mengedepan responsivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; *Ketiga*, Kemungkinan bisa layak secara ekonomi dan keuangan (*Economic and Financial Possibility*), yakni mengedepankan efesiensi dan bisa mampu dijalankan secara pembiayaan; dan yang *Keempat*, mampu dijalankan secara administrasi (*Administrative Operability*), yakni apakah kebijakan tersebut mampu dijalankan secara administratif. (Maulana and Nugroho 2020)

2. Penguatan Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Untuk Menciptakan Kualitas Kebijakan Publik

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik harus mengedepankan aspek-aspek analisis sehingga semakin hari semakin berkualitas kebijakannya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan fungsi dari analisis kebijakan

dilingkungan Pemerintah, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya proses deliberatif dalam proses kebijakan. Lahirnya jabatan fungsional analisis kebijakan juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Kehadiran analisis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang ada selama ini bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elite. (Kristiana et al. 2021)

Gambar 2
Model Penguatan JFAK dalam Merealisasikan Kebijakan Publik yang Berkualitas



Sumber: Hasil Analisis Model dengan Atlas TI 2024

JFAK harus terus diperkuat dan diberikan ruang sesuai dengan kewenangannya dimasing-masing OPD. Proses perencanaan ditingkat OPD harus melalui proses analisis yang dilakukan oleh JFAK sehingga kebijakan, program, dan

kegiatan yang direncanakan merupakan hasil rekomendasi terbaik dari sebuah diskursus para analis kebijakan publik di Pemerintah.

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh JFAK sesuai dengan jenjangnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Jenjang, Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Fungsional JFAK

No	Jenjang	Manajerial	Komptensi Teknis	Fungsional
1.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pelatihan dasar bagi CPNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analisis Kebijakan (policy brief/policy paper/jurnal) • Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik • Pelatihan data science (big data) • Pelatihan infografis 	Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama)
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan budaya integritas dan anti korupsi • Pelatihan coaching/mentoring • Pelatihan kepemimpinan administrator atau pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah Analisis Kebijakan (policy brief/policy paper/jurnal) • Pelatihan menulis naskah karya tulis kedinasan • Pelatihan metodologi analisis kebijakan publik • Pelatihan data science (big data) • Pelatihan infografis 	Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama)

3.	<p>Analisis Kebijakan Ahli Madya</p>	<p>Pelatihan Kepemimpinan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Advokasi Kebijakan • Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus • Pelatihan menulis studi kasus kebijakan • Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional • Pelatihan menulis orasi ilmiah Analisis Kebijakan 	<p>Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui inpassing dan pengangkatan pertama)</p>
4.	<p>Analisis Kebijakan Ahli Utama</p>	<p>Pelatihan Kepemimpinan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Advokasi Kebijakan • Pelatihan menulis publikasi di jurnal terindeks Scopus • Pelatihan menulis studi kasus kebijakan • Pelatihan menulis artikel opini di media massa nasional dan internasional • Pelatihan menulis orasi ilmiah Analisis Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan khusus analisis kebijakan (bagi AK yang diangkat dalam JFAK melalui perpindahan dari jabatan lain) • Pelatihan Analisis Kebijakan Lanjutan (bagi AK Ahli Utama yang naik jenjang dari AK Ahli Madya)

Sumber : (Kristiana et al. 2021)

4. PENUTUP

Sejatinya kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik, khususnya di pemerintah daerah. Persoalan isu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, lingkungan, tata kota, dan lain-lain dapat diselesaikan melalui kebijakan bukti nyata (*evidence-based policy making*) dari Pemerintah Daerah. Kebijakan harus merupakan hasil dari analisis kebijakan yang komprehensif. Tentu, untuk merealisasikan tersebut maka perlu ada peningkatan dan penguatan fungsi dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) melalui beberapa kegiatan peningkatan kompetensi sehingga kualitas JFAK semakin berkualitas dalam menganalisis. Oleh karena itu, pembentukan forum sangat baik dan sangat strategis agar kegiatan-kegiatan peningkatan dan penguatan kompetensi terus berjalan secara keberlanjutan. Sehingga JFAK merupakan jabatan fungsional yang strategis dan bermanfaat untuk merealisasikan visi dan misi dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiana, Agit, Aldhino Niki Mancera, Indri Dwi Apriliyanti, and Media Wahyudi Askar. 2021. *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan*. <https://www.ksi-indonesia.org/id/pengetahuan/detail/2390-panduan-optimalisasi-peran-jabatan-fungsional-analisis-kebijakan>.
- Maulana, Delly. 2023. "Pemetaan Riset Kebijakan Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Bibliometric Analysis." In *DISRUPSI KEILMUAN SOSIAL ERA DIGITAL Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, Dan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 1–10.
- Maulana, Delly, and Arif Nugroho. 2019. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*.
- — —. 2020. "Policy Formulation of The Marine Governance In The Coastal Southern Lebak Regency Banten Province." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18(3): 565–71.
- Nugroho, Riant. 2016. "Kebijakan Publik Di Indonesia."